

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
NOMOR : 025/KAK/412.303/2018**

1. **NAMA SKPD** : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. **KEGIATAN** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
3. **LATAR BELAKANG**
 - a. Dasar Hukum
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 8) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018.

b. Gambaran Umum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemerintah guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya dan merupakan kebutuhan informasi bagi *stakeholder* (organisasi, pengusaha dan masyarakat), guna pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pelaku usaha dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah.

c. Data Dukung Rencana Kegiatan

- 1) Sumber Pendanaan;
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM);
- 3) Perangkat IT (Teknologi dan Informasi)
- 4) Sumber data.

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) yang ada berbasis Kas sedangkan mulai tahun 2015 penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis Akrual oleh karena itu diperlukan pengembangan aplikasi yang baru yang berbasis Akrual, guna menunjang kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien.

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

- a. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan informasi kepada *stakeholder* tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan kinerja pegawai dengan pengembangan aplikasi baru yang lebih efektif dan efisien;
- c. Peningkatan kualitas SDM dengan penerapan teknologi terkini dalam pengembangan aplikasi.

6. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini adalah:

- a. Membuat Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

7. HAL YANG HARUS ADA DAN TIDAK BOLEH ADA

- a. Hal yang harus ada :
 - 1) Sumber Pendanaan kegiatan;
 - 2) Sumber daya Manusia :
 - Memahami peraturan perundang-undangan;
 - Memahami I T (Aplikasi, software);
 - Administratif yang tertib dan tersimpan rapi
- b. Hal tidak boleh ada
 - 1) Perda tidak sesuai dengan ketentuan

8. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

Buku Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Komitmen dari masing-masing kepala SKPD;
- b. Peraturan-peraturan mengenai Penyusunan dan Pelaksanaan APBD;
- c. Peraturan tentang Standart Satuan Harga;
- d. Peraturan tentang Standar Biaya Umum.

10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Bulan Januari s/d Agustus 2019 Dilaksanakan di kabupaten Bojonegoro.

11. DANA YANG DIBUTUHKAN

Dana yang dibutuhkan untuk Kegiatan Tersebut Rp. 187.587.800,-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANIE SUSANTI HARTOYO, SE.Ak

Pembina

NIP. 19770313 200112 2 001

SOFIA RACHMAWATI, SE. Ak

Penata Tk. I

NIP. 19790417 200501 2 021

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19641117 199301 1 003